



Nomor: SP-12/PWK.6/2025

APBN Sumsel Tetap Tangguh hingga November 2025: Pendapatan Tumbuh Kuat, TKD Meningkat, dan Stabilitas Ekonomi Terjaga

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan hingga 30 November 2025 menunjukkan ketahanan fiskal yang tetap terjaga. Pendapatan negara terus tumbuh kuat, Transfer ke Daerah (TKD) meningkat signifikan, serta indikator makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat berada pada tren positif, meskipun belanja pemerintah pusat masih mengalami kontraksi seiring kebijakan efisiensi anggaran.

Hingga akhir November 2025, pendapatan negara di Sumatera Selatan tercatat sebesar **Rp13,84 triliun** atau **78,88% dari target**. Capaian ini meningkat dibandingkan posisi Oktober dan terutama didorong oleh kinerja penerimaan pajak yang mencapai **Rp10,93 triliun** (73,32% dari target) dengan pertumbuhan 9,57% (yoy). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh implementasi coretax serta meningkatnya setoran PPN dan PPh Badan dari sektor-sektor unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan perhutanan. Penerimaan kepabeanan dan cukai juga menunjukkan kinerja sangat kuat dengan realisasi **Rp412,39 miliar** (238,57% dari target), tumbuh 48,50% (yoy), didorong oleh kenaikan harga patokan ekspor (HPE) dan meningkatnya ekspor CPO dan produk turunannya. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai **Rp2,49 triliun** atau 101,46% dari target, melanjutkan tren positif terutama dari kinerja lelang dan optimalisasi Barang Milik Negara (BMN).

Belanja negara hingga 30 November 2025 terealisasi sebesar **Rp42,93 triliun** atau **85,97% dari pagu**, meskipun secara tahunan masih terkontraksi 4,78% (yoy). Belanja Kementerian/Lembaga tercatat Rp11,45 triliun (74,28%), terkontraksi 25,97% (yoy) akibat kebijakan efisiensi anggaran yang menahan belanja barang dan belanja modal sejak awal tahun. Di sisi lain, belanja pegawai dan bantuan sosial tetap tumbuh positif, menopang daya beli masyarakat dan menjaga kesinambungan pelayanan publik.

Transfer ke Daerah (TKD) tetap menjadi penopang utama fiskal daerah dengan realisasi mencapai **Rp31,48 triliun** atau **91,19% dari pagu**, tumbuh 6,28% (yoy). Kinerja positif ini terutama ditopang oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang meningkat seiring kebijakan simplifikasi dan percepatan penyaluran. TKD yang





kuat menunjukkan peran penting APBN dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah terbatasnya ruang ekspansi belanja pemerintah pusat.

Dari sisi ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap solid pada kisaran 5,20% (yoy), tertinggi kedua di wilayah Sumatera dan melampaui pertumbuhan nasional. Inflasi November 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan Oktober, mencerminkan stabilitas harga yang terjaga. Pasar kerja menunjukkan perbaikan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,69%, diikuti penyerapan tenaga kerja yang meningkat. Indikator kesejahteraan lainnya juga membaik, tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan menjadi 10,15%, perbaikan Gini Ratio menjadi 0,311, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 130,85.

Kinerja APBD regional hingga November 2025 juga menunjukkan perkembangan positif. Pendapatan daerah terealisasi Rp37,99 triliun (78,20%), dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp8,06 triliun. Belanja daerah terealisasi Rp32,13 triliun (63,88%), meskipun masih memerlukan percepatan terutama pada belanja modal agar dampak pembangunan dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.

Kementerian Keuangan melalui sinergi Kanwil DJPb, DJP, DJBC, dan DJKN di Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi fiskal pusat dan daerah. Upaya tersebut difokuskan pada optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, percepatan penyaluran TKD, serta penguatan peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian positif hingga November 2025 menjadi modal penting untuk menjaga kinerja APBN Sumatera Selatan tetap kredibel dan berkelanjutan hingga akhir tahun.



Narahubung:

Agung Heru Pranyoto

Ketua Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik
Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang
Jl. Sukabangun II, Sukarami, Sukajaya, Palembang 30151